



BUPATI BULELENG

Nomor : 700.1.2.5/059/ITDA/2024
Lamp : -
Perihal : Tindak Lanjut

Singaraja, 4 Januari 2024

Kepada :

- Sdr. 1. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng
2. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Buleleng
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng

di-

Singaraja.

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Nomor: 84/LHP/XIX.DPS/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kopi Arabika dan Kopi Robusta Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Instansi Terkait Lainnya, dengan temuan Pemerintah Kabupaten Buleleng Belum Optimal dalam Meningkatkan Perlindungan Terhadap Produk Unggulan Daerah, maka dengan ini diperintahkan kepada saudara:

- a. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah agar lebih intensif melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam perlindungan hukum bagi pelaku usaha PUD;
- b. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lebih intensif melakukan sosialisasi:
 - 1) Pentingnya *branding* agar usaha lebih berdaya saing dan lebih dikenal oleh masyarakat luas;
 - 2) Pemenuhan standar mutu PUD yang dilakukan secara bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah agar berkoordinasi secara intensif dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melakukan pemadanan data pelaku usaha di Kabupaten Buleleng;
- d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih intensif melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang belum memiliki NIB dan belum melakukan migrasi perizinan berusaha.

Demikian untuk mendapat perhatian dan pelaksanaannya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, sebagai tindak lanjut.
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja, sebagai laporan.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.
4. Arsip.